

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – TATA TERTIB
2018

PDPRD NO.1, 74 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - Pengoptimalan pelaksanaan, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun serta melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 24, Pasal 50, Pasal 63, Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, sehingga perlu membentuk peraturan yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah : UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 tahun 2015; PERGUB JATIM No.20 Tahun 2018; PERDA KOTA MADIUN No.6 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan DPRD ini mengatur mengenai fungsi, tugas dan wewenang DPRD, kedudukan dan keanggotaan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan kewajiban dan hak anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, hari kerja dan pakaian, pemberhentian antar waktu, penggantian antarwaktu dan pemberhentian, Fraksi, kode etik, konsultasi DPRD serta pelayanan atas pengaduan dan aspirasi Masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan DDPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2018.